

SKRIPSI
PEMENUHAN HAK PILIH BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA
RUMAH TAHANAN KELAS II B BATUSANGKAR DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
DI KABUPATEN TANAH DATAR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



FIDELA AULIA KHAIRI

1710112006

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)

Pembimbing :

Ilhamdi Taufik, S.H.,M.H

Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I.,LLM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PEMENUHAN HAK PILIH BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA
RUMAH TAHANAN KELAS II B BATUSANGKAR DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI
KABUPATEN TANAH DATAR**

**Fidela Aulia Khairi, 1710112006, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V), 66 halaman, Tahun 2021. Pembimbing:
Ihamdi Taufik, S.H., M.H dan Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I., LLM**

ABSTRAK

Jaminan hak memilih sangat dipengaruhi oleh sejauhmana seorang warga negara masuk ke dalam daftar pemilih, namun terdapat hambatan terkait hak pilih tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar, pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020. Dari penghuni tahanan dan narapidana yang berjumlah 116 orang, pada tanggal 9 Desember 2020 hanya 73 orang yang dapat dimasukkan dalam data pemilih pada tempat pemungutan suara setempat. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pemenuhan Hak Pilih Tahanan dan Narapidana Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Dari paparan diatas maka ditariklah beberapa rumusan masalah yaitu *pertama* pengaturan terkait hak pilih tahanan dan narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. *Kedua*, pemenuhan hak pilih tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan melalui perundang-undangan dan dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab tahanan dan narapidana tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena disebabkan oleh sulitnya menelusuri data otentik tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan. Perlu koordinasi antar lembaga yang lebih kuat dan berkesinambungan dan menambah regulasi yang dapat mempermudah proses pendataan tahanan dan narapidana ke dalam data pemilih.

Kata Kunci : Hak Pilih, Pilkada, Tahanan dan Narapidana

